

# **KETIDAKEFEKTIFAN SANKSI EKONOMI ARAB SAUDI TERHADAP QATAR TAHUN 2017-2018**

**Sandy Reksa Kresnata Abdullah**

Email : [sandyreksak@gmail.com](mailto:sandyreksak@gmail.com)

**Sidiq Ahmadi, S.IP., M.A.**

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## ***ABSTRACT***

This thesis explains why Saudi Arabia's economic sanctions on Qatar are ineffective. Saudi Arabia cut ties with Qatar and gave Qatar economic sanctions. This conflict occurred because Qatar's policies were not in accordance with the wishes of Saudi Arabia and Qatar not wanting to fulfill Saudi Arabia's demands. Actually, the conflict that occurred between Saudi Arabia and several Gulf States with Qatar has happened since decades ago. However, before this conflict occurred, Qatar had a fairly good relationship with Saudi Arabia and the Gulf States by forming the Gulf Cooperation Council. After giving economic sanctions by Saudi Arabia to Qatar, Saudi Arabia gave 13 demands that must be met by Qatar if Qatar wants economic sanctions to be lifted. The provisions of economic sanctions itself aim to ensure that the stability of Qatar will be disrupted and Qatar will surrender until finally meeting the demands of Saudi Arabia and changing its policies in accordance with the wishes of Saudi Arabia. Qatar does not want to obey Saudi Arabia's demands because Qatar considers that they have the same power as Saudi Arabia, besides that Qatar also has no dependence on Saudi Arabia. Qatar also has relations with Iran and Turkey. As a result of these sanctions, Qatar has difficulty fulfilling food supplies because 80% of Qatar's food supply comes from Gulf countries. In addition, Qataris were ordered to immediately leave the territory of Saudi Arabia and not be able to perform the Hajj because Saudi Arabia closed the electronic registration system used by Qatari agents to register permits and residents of Qatar were unable to obtain visas due to the absence of a visa. diplomatic relations between the two countries. By using the theory of success of sanctions according to Johan Galtung, the ineffectiveness of economic sanctions is because economic sanctions from Saudi Arabia does not meet the indicators of the success and effectiveness of economic sanctions.

**Keywords : Economic Sanctions, Arab Saudi, Qatar, Middle East, Ineffectiveness of Economic Sanctions.**

**ABSTRAK**

Karya tulis ini menjelaskan mengapa sanksi ekonomi Arab Saudi terhadap Qatar dinilai tidak efektif. Arab Saudi memutuskan hubungan dengan Qatar dan memberi Qatar sanksi ekonomi. Konflik ini terjadi karena kebijakan Qatar tidak sesuai dengan keinginan Arab Saudi dan Qatar tidak mau memenuhi tuntutan Arab Saudi. Sebenarnya, konflik yang terjadi antara Arab Saudi serta beberapa Negara-negara Teluk dengan Qatar telah terjadi sejak beberapa dekade lalu. Namun, sebelum konflik ini terjadi, Qatar sempat memiliki hubungan yang cukup baik dengan Arab Saudi dan Negara-negara Teluk dengan membentuk Gulf Cooperation Council (Dewan Kerjasama Teluk). Setelah pemberian sanksi ekonomi oleh Arab Saudi terhadap Qatar, Arab Saudi memberikan 13 tuntutan yang harus dipenuhi oleh Qatar jika Qatar ingin sanksi ekonomi tersebut dicabut. Pemberian sanksi ekonomi ini sendiri bertujuan agar stabilitas Qatar akan terganggu dan Qatar akan menyerah hingga akhirnya memenuhi tuntutan Arab Saudi dan mengubah kebijakannya sesuai keinginan Arab Saudi. Qatar tidak mau menuruti kemauan Arab Saudi karena Qatar menganggap mereka memiliki kekuatan yang sama dengan Arab Saudi, selain itu Qatar juga tidak memiliki ketergantungan kepada Arab Saudi. Qatar juga menjalin hubungan dengan Iran dan Turki. Dampak dari sanksi ini, Qatar kesulitan memenuhi pasokan pangan karena 80% pasokan pangan Qatar berasal dari Negara-negara Teluk. Selain itu, warga Qatar diperintahkan untuk segera meninggalkan wilayah Arab Saudi dan tidak dapat melakukan ibadah haji karena Arab Saudi menutup sistem pendaftaran elektronik yang biasa digunakan agen-agen Qatar untuk mendaftarkan izin serta penduduk Qatar tidak dapat mendapatkan visa karena tidak adanya hubungan diplomatik antara kedua Negara. Dengan menggunakan teori keberhasilan sanksi menurut Johan Galtung, ketidakefektifan sanksi ekonomi tersebut karena sanksi ekonomi dari Arab Saudi tidak memenuhi indikator keberhasilan dan efektivitas sanksi ekonomi.

**Kata Kunci : Sanksi Ekonomi, Arab Saudi, Qatar, Timur Tengah, Ketidakefektifan Sanksi Ekonomi.**

**PENDAHULUAN**

Timur Tengah saat ini kembali bergejolak, dimana konflik-konflik terdahulu seperti konflik Suriah, Palestina, maupun terorisme belum selesai, sekarang wilayah Timur Tengah bagian selatan kembali menuai konflik dimana mayoritas Negara di Timur Tengah bersama-

sama memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, terutamanya Arab Saudi yang bertindak sebagai aktor utama pemutusan hubungan diplomasi dan pemberian sanksi ekonomi terhadap Qatar.

Sebenarnya, konflik yang terjadi antara Arab Saudi serta beberapa Negara-negara Teluk dengan Qatar telah terjadi sejak beberapa dekade lalu. Namun, sebelum konflik ini terjadi, Qatar sempat memiliki hubungan yang cukup baik dengan Arab Saudi dan Negara-negara Teluk dengan membentuk Gulf Cooperation Council (Dewan Kerjasama Teluk).

Pembentukan GCC terutama didasarkan pada kekhawatiran Negara-negara anggotanya terhadap “ancaman Iran”. Yang dimaksud “ancaman Iran” adalah kemungkinan meluasnya pengaruh revolusi Iran dan kemungkinan kemenangan Iran dalam Perang Teluk I (Perang Iran-Irak, 1980-1988). Iran memang memandang GCC sebagai sarana untuk menutupi ekspansi pengaruh Arab Saudi. Iran juga memandang GCC sebagai sebuah instrumen bagi kebijakan Amerika Serikat di Teluk, sebagaimana dulu Negara-negara Arab “radikal” memandang Iran di bawah Shah (Sihbudi, 2007).

Sebelumnya, Arab Saudi dan Negara-negara Teluk memiliki hubungan yang baik dengan Qatar dan dapat dikatakan Arab Saudi dekat dengan Qatar pada masa kepemimpinan emir Qatar, Khalifa bin Hamad Al Thani. Khalifa bin Hamad Al Thani sendiri dikenal sebagai sosok yang pro dengan Arab Saudi, namun pasca Khalifa bin Hamad Al Thani di kudeta dari jabatannya, hubungan Arab Saudi dengan Qatar mulai memburuk.

Pemutusan hubungan diplomatik ini dimulai pada 05 Juni 2017 dimana beberapa Negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan Libya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar secara tiba-tiba. Kemudian tidak lama kemudian pemutusan hubungan diplomatik ini diikuti juga oleh Maladewa dan Yaman (Wadrianto, 2017).

Negara-negara tersebut memberlakukan penarikan duta besar mereka yang berada di Qatar, memberlakukan larangan perdagangan dan perjalanan dari maupun ke Qatar, serta menyerukan kepada warga Negara Qatar untuk meninggalkan Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi dalam tenggat waktu dua pekan (Dewi, 2017).

Namun, tidak semua Negara-negara di Timur Tengah mengikuti pemutusan hubungan dan pemberian sanksi ekonomi terhadap Qatar yang dipelopori oleh Arab Saudi. Salah satunya adalah dua Negara anggota Dewan Kerjasama Kawasan Teluk, Kuwait dan Oman, dimana

kedua Negara tersebut terutamanya Kuwait berusaha untuk melakukan perundingan mediasi damai antara Qatar dan Arab Saudi untuk menurunkan ketegangan di kawasan Timur Tengah (Sinaga, 2017).

Pada Maret 2014, Arab Saudi menarik duta besarnya dari Qatar, dan Arab Saudi juga mengajak Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk ikut serta menekan Qatar. Namun setelah 8 bulan, hubungan Qatar dengan Negara-negara anggota GCC sempat kembali membaik (Nurjanah & Permadi, 2017).

Faktor lainnya yang menyebabkan pemberian sanksi ekonomi ini adalah Arab Saudi menganggap bahwa Qatar memberikan dukungan dan bantuan kepada organisasi-organisasi teroris. Orang-orang kaya di Qatar diyakini memberikan sumbangan besar kepada ISIS, sementara pemerintah Qatar memberi bantuan uang dan senjata kepada kelompok Islam garis keras di Suriah (BBC, Tujuh negara Arab putuskan hubungan diplomatik: Ada apa dengan Qatar?, 2017).

Qatar juga dituduh memiliki hubungan dengan kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai Front al Nusra yang berafiliasi dengan al-Qaida serta mendukung Ikhwanul Muslimin yang dilarang di berbagai Negara Arab, dan bahwa Qatar terus menerus mempromosikan pesan dan gagasan kelompok-kelompok ini melalui media mereka seperti Al Jazeera (BBC, Tujuh negara Arab putuskan hubungan diplomatik: Ada apa dengan Qatar?, 2017).

Ada 13 tuntutan yang diberikan oleh Arab Saudi kepada Qatar agar sanksi ekonomi Qatar dicabut, yaitu:

1. Mengurangi hubungan dengan Iran;
2. Menutup sebuah pangkalan militer Turki yang berada di wilayah Qatar;
3. Qatar harus menutup stasiun televisi Al Jazeera karena dianggap sebagai media untuk teroris menyebarkan propagandanya;
4. Memutuskan semua hubungan dengan organisasi terorisme;
5. Menutup kantor berita yang didanai oleh Qatar secara langsung maupun tidak langsung;
6. Menghentikan seluruh pendanaan kepada individu, kelompok ataupun organisasi yang dianggap teroris oleh Arab Saudi;
7. Menyerahkan tokoh teroris yang dicari oleh Arab Saudi dan sekutunya;

8. Tidak ikut campur ke dalam urusan Negara berdaulat;
9. Menghentikan seluruh kontak dengan oposisi Arab Saudi;
10. Membayar kompensasi atas hilangnya nyawa serta kerugian finansial yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir;
11. Menaati kebijakan kerjasama yang dibuat Arab Saudi pada 2014;
12. Setujui semua tuntutan dalam waktu 10 hari sejak diserahkan ke Qatar;
13. Menyetujui audit bulanan untuk tahun pertama setelah menyetujui tuntutan (APnews, 2017).

Namun, Qatar menolak untuk memenuhi tuntutan Arab Saudi, Sheikh Saif bin Ahmed Al-Thani (direktur kantor komunikasi Qatar) berkata "Mereka tidak ingin kita membuat keputusan, mereka ingin membuat keputusan untuk kita, mereka pikir kami akan menyerah dan melakukan apa yang mereka katakan kepada kita. Itu tidak akan pernah terjadi" (Trofimov, 2018).

Disamping itu, Iran juga turut menyerukan dukungannya terhadap Qatar dalam pembicaraan Presiden Iran, Hassan Rouhani dengan Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Hassan Rouhani mengatakan "Teheran berdiri dengan Negara dan pemerintah Qatar. Kami percaya bahwa jika ada konflik antara Negara-negara di kawasan, maka tekanan, ancaman atau sanksi bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan" (Deutsche Welle, Krisis Diplomatik Arab: Iran Dukung Qatar, AS Usulkan Dialog, 2017)

Dampaknya sendiri bagi Qatar tentu saja sangat terasa, salah satunya adalah sulitnya pasokan pangan di Qatar. 80% pasokan pangan Qatar sendiri selama ini berasal dari Negara-negara Teluk, sehingga pada saat pemberian sanksi ekonomi terhadap Qatar truk-truk pengirim pasokan makanan ke Qatar tertahan di perbatasan Arab Saudi dan dilarang untuk masuk ke Qatar. Dampak lain yaitu penerbangan Qatar dilarang untuk mendarat maupun melintasi wilayah udara dari Bahrain, Arab Saudi dan Mesir, sehingga penerbangan Qatar harus dialihkan melalui jalur lain yang lebih jauh dan mengurangi pemasukan bagi Qatar (Priyambodo, 2017). Namun, walaupun sanksi ekonomi tersebut memberikan dampak yang cukup besar, Qatar mampu bertahan menghadapi sanksi ekonomi tersebut. Para ahli memperkirakan Qatar akan mengalami krisis, tetapi hal itu tidak pernah terjadi karena Qatar malah mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi, dimana GDP Qatar tumbuh sesuai target 2,4% pada 2018 dari 1,6% pada 2017 menurut International Monetary Fund (Etehad, 2018).

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam kasus tidak efektifnya sanksi ekonomi Arab Saudi terhadap Qatar, penulis menggunakan teori keberhasilan sanksi ekonomi dari Johan Galtung untuk menjelaskan kasus yang penulis angkat.

## **RESTRUKTURISASI EKONOMI QATAR**

Seperti yang diketahui, Pada awalnya Qatar merupakan Negara yang sangat miskin dikarenakan wilayahnya yang tandus sehingga tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam maupun menghasilkan panen yang melimpah, karena tidak memungkinkan untuk bercocok tanam akhirnya warga Qatar mencoba untuk membudidayakan mutiara dan mengekspornya dengan harapan akan memperbaiki pendapatan Negara.

Selain itu, pada saat itu Qatar masih belum merdeka dan masih berada dibawah jajahan Inggris yang semakin membuat Qatar merana dan berusaha keras untuk bangkit dari kemiskinan dan lepas dari Inggris. Alasan Qatar mencoba untuk beralih menjadi penghasil mutiara tidak lain karena wilayah Qatar sebagian besar berbatasan langsung dengan Teluk Arab di bagian Utara dan target utama ekspor mutiara Qatar pada saat itu adalah pasar Eropa dan Negara-Negara Timur Tengah lainnya.

Hingga pada akhirnya di abad ke 20 keadaan Qatar berbalik 180 derajat hingga sekarang, tahun 1939 Qatar menemukan cadangan minyak bumi dan gas alam yang melimpah di wilayahnya yang menjadi sumber penghasilan utama Qatar dan menjadikan Qatar sebagai salah satu produsen minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia (Tuwo, 2017).

Hal ini membuat sumber pemasukan utama Qatar berasal dari minyak bumi dan gas alam. LNG menyumbang pemasukan yang sangat besar bagi Qatar, ditambah lagi dengan rencana pengembangan produksi LNG di Qatar yang akan menambah jumlah produksi LNG Qatar akan meningkat secara signifikan.

Penjualan LNG Qatar juga lebih menguntungkan dibandingkan para pesaingnya seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Australia karena biaya produksi LNG di Qatar relatif lebih murah yang mengakibatkan harga jual LNG Qatar juga lebih murah dibandingkan para pesaingnya. Selain itu, Qatar juga diuntungkan dengan jarak distribusi kepada konsumen LNG Qatar yang mayoritas konsumennya berasal dari Negara-negara Asia dan Eropa yang membuat jarak distribusinya relatif lebih pendek (Andri & Cakti, 2017).

### a) **Diversifikasi Ekonomi**

Gencarnya Qatar dalam mengeksplorasi sumber minyak dan gas alamnya serta tingginya permintaan ekspor membuat Qatar mencari alternatif lain untuk mengembangkan perekonomiannya, Qatar sadar walaupun Qatar merupakan Negara penghasil gas alam terbesar tapi suatu saat sumber minyak dan gas alam mereka akan habis dan sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbarui. Ditambah lagi, jumlah produksi minyak bumi Qatar masih kalah cukup jauh di bandingkan Negara-negara Teluk yang lain. Produksi minyak bumi Qatar pada tahun 2017 berada di urutan ke 9 di dunia dan berada di urutan ke 6 di antara Negara-negara Teluk.

Sehingga Qatar mencanangkan program diversifikasi ekonomi melalui Qatar National Vision 2030 (QNV2030) yang berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk masa depan Qatar dan bertujuan untuk menjadikan Qatar sebagai Negara dengan masyarakat maju yang mampu melakukan pembangunan yang berkelanjutan yang menghasilkan standar hidup yang tinggi bagi semua warga Negara dan penduduk Qatar dalam beberapa aspek kehidupan mereka pada tahun 2030 (Hukoomi : Qatar e-Government, Qatar National Vision 2030, 2019). Selama lebih dari 20 tahun, pendapatan minyak telah diinvestasikan secara optimal ke berbagai macam bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan masih banyak lagi.

Program ini tentu saja membantu strategi, kebijakan, perencanaan, dan alokasi dana dan sumber daya yang dipimpin pemerintah Qatar untuk mencapai tujuan yang terpadu (Hukoomi : Qatar e-Government, Qatar National Vision 2030, 2019). Qatar National Vision 2030 akan difokuskan kepada empat pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu : Economic Development, Human Development, Social Development, dan Environmental Development.

1. Economic Development : Elemen kunci dari pembangunan ekonomi yang sukses dan berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya hidrokarbon Qatar yang efektif dan berjangka panjang yang membutuhkan penemuan keseimbangan yang tepat antara eksploitasi energi dan diversifikasi ekonomi. Sektor minyak dan gas yang kuat akan terus memainkan peran sentral dalam ekonomi Qatar, karena memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Negara. Namun, Qatar National Vision 2030 juga menetapkan tujuan dalam diversifikasi menuju pertumbuhan di sektor non-energi dan Transformasi Qatar menjadi ekonomi berbasis pengetahuan sedang berlangsung (Hukoomi : Qatar e-Government, Qatar National Vision 2030, 2019).

2. Human Development : Pembangunan ini berupaya untuk memberdayakan rakyat Qatar sehingga rakyat Qatar akan dapat mempertahankan dan mendukung pertumbuhan Qatar, dan tentu saja untuk mewujudkan hal ini membutuhkan peningkatan dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan tenaga kerja secara umum. Qatar terus melakukan ekspansi ekonomi berbasis pengetahuan dan Qatar secara proaktif mengembangkan sistem pendidikannya agar menjadi yang terbaik di dunia (Hukoomi : Qatar e-Government, Qatar National Vision 2030, 2019).
3. Social Development : Pembangunan ini mencerminkan perubahan sosial yang diperlukan untuk memajukan masyarakat Qatar dan juga memberikan arahan tentang perkembangan Qatar dalam konteks komunitas global. Warga Negara Qatar juga dituntut untuk bisa fleksibel dalam memenuhi tuntutan masa depan sambil melestarikan lembaga keluarga. Aspek utama dari strategi pembangunan sosial Qatar meliputi: Melestarikan warisan Qatar dan meningkatkan identitas Arab dan Islamnya, Membangun masyarakat yang aman dan stabil, Mempromosikan semangat toleransi dan keterbukaan, Memberdayakan perempuan, Memberikan layanan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat (Hukoomi : Qatar e-Government, Qatar National Vision 2030, 2019).
4. Environmental Development : Pembangunan ini berfokus pada pentingnya menemukan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Ketika sumber air dan hidrokarbon global berkurang serta efek polusi dan degradasi lingkungan meningkat, sangat penting bagi Qatar untuk bekerja dengan tetangga regional dan komunitas internasional untuk melindungi lingkungan. Pada tingkat nasional, pemerintah Qatar juga secara aktif terlibat dalam menjaga industri seperti pemeriksaan melalui penilaian lingkungan dan pembuatan undang-undang (Hukoomi : Qatar e-Government, Qatar National Vision 2030, 2019).

Diversifikasi yang dilakukan oleh Qatar dapat dikatakan sukses karena sektor non-migas Qatar menyumbang GDP yang cukup besar. Pada 2018, GDP non-migas diperkirakan naik sekitar 5,0%, pemerintah Qatar juga fokus untuk menyelesaikan proyek-proyek besar di sektor-sektor utama infrastruktur berkelanjutan dan akan memastikan bahwa konstruksi akan tetap menjadi tulang punggung sektor non-migas dengan perkiraan pertumbuhan 15,5% (QNB, 2018).

Pemerintah Qatar juga membuat kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat sektor swasta dan meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan, dimana pertumbuhan sektor pertanian 8,2%, manufaktur 3,2%, transportasi dan penyimpanan 3%, diharapkan menjadi penerima manfaat utama dari sektor non-migas dengan pertumbuhan di sektor-sektor ini diperkirakan akan meningkat pada tahun 2019 (QNB, 2018).

Selain itu, pemerintah Qatar juga gencar untuk berinvestasi di Negara lain maupun menerima investasi asing yang ingin masuk ke Qatar sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi Qatar. Pasca Arab Saudi memberikan sanksi ekonomi kepada Qatar, indeks saham Qatar langsung anjlok lebih dari 7% di Doha dan membuat banyak investor yang mencemaskan kondisi terkini di kawasan Teluk dapat berimbas buruk terhadap investasi mereka di Qatar. Namun, ekonomi Qatar memiliki portofolio yang sangat beragam dan mencakup banyak hal seperti Volkswagen hingga Tiffany & Co (Rafie, 2017).

Nilai dana kelolaan pemerintah Qatar lebih dari 30 Miliar USD telah diinvestasikan ke sejumlah saham dan dana kelolaan lainnya diinvestasikan di aset-aset lain melalui Qatar Investment Authority yang dibentuk pada tahun 2005, hal ini membuat investornya memiliki kepercayaan untuk tetap melakukan investasi di Qatar karena pertumbuhan ekonomi Qatar yang baik dan terjamin (Rafie, 2017).

Investasi Qatar tersebar di berbagai macam Negara dalam berbagai macam bentuk investasi. Negara yang menjadi tujuan investasi tersebut di antara lain :

1. Indonesia : Pada 2009, sebesar 65% saham mayoritas dari Indosat, perusahaan telekomunikasi asal Indonesia yang bernilai lebih dari 3 Miliar USD diakusisi oleh perusahaan telekomunikasi Qatar yaitu Qtel, yang membuat Indosat berganti nama menjadi Indosat ooredoo (Deutsche Welle, Gurita Duit Penguasa Qatar, 2017). Selain itu, Qatar Investment Authority melalui Nebras Power yang merupakan anak perusahaannya membeli 35% saham dari P.aiton yang merupakan perusahaan pembangkit listrik senilai 1,3 Miliar USD dan dengan langkahnya tersebut membuat Qatar menguasai operator pembangkit listrik terbesar di Indonesia (Deutsche Welle, Gurita Duit Penguasa Qatar, 2017)

2. Jerman : Qatar memiliki 17% saham pada perusahaan otomotif asal Jerman, Volkswagen melalui Qatar Holding (Deutsche Welle, Gurita Duit Penguasa Qatar, 2017). Saham tersebut kurang lebih bernilai sebesar 9 Miliar USD dan menjadikan Qatar sebagai investor terbesar ketiga di Volkswagen setelah keluarga Porsche dan Lower Saxony (Rafie, 2017).
3. Inggris : Pada saat krisis keuangan 2008, Qatar Investment Authority mengambil kesempatan untuk menambah portofolionya dengan menguasai 6% saham dari Barclay yang merupakan bank terbesar ketiga di Inggris dan 10,3 % saham pada London Stock Exchange (Deutsche Welle, Gurita Duit Penguasa Qatar, 2017). Qatar juga berinvestasi dalam bidang property di Inggris, di antara lain : The Shard di London, perumahan mewah Chelsea Barracks dan desa Olimpiade yang ditaksir bernilai lebih dari 700 Juta USD, selain itu Qatar Airways menambah nilai investasi di British Airways sebesar 20% dan membuat nilai investasi Qatar di Inggris mencapai 50 Miliar USD (Deutsche Welle, Gurita Duit Penguasa Qatar, 2017).
4. Rusia : Pada Desember 2016, Qatar Investment Authority membeli 19,5% saham Rosneft yang merupakan perusahaan minyak asal Rusia senilai 11 Miliar USD, selain itu Qatar juga membeli 24,9% saham St Petersburg International Airport (Deutsche Welle, Gurita Duit Penguasa Qatar, 2017).
5. Amerika Serikat: Qatar Investment Authority membuka kantor di New York pada 2015 dan berjanji akan dana investasi sebesar 35 Miliar USD hingga 2020, yang antara lain digunakan untuk membeli 9,9 % saham Empire State Building dan banyak properti kelas atas di New York, Los Angeles dan Washington DC yang menjadikan Qatar sebagai investor gedung perkantoran terbesar ke 4 di Amerika Serikat (Deutsche Welle, Gurita Duit Penguasa Qatar, 2017).
6. Swiss : Pada 2008, Qatar membeli 17,8% saham Credit Suisse yang merupakan bank asal Swiss dan kemudian meningkatkan nilai akuisisi sahamnya, menggeser Olayan yang sebelumnya merupakan investor tunggal terbesar yang mana Olayan merupakan perusahaan investasi keluarga asal Arab Saudi (Deutsche Welle, Gurita Duit Penguasa Qatar, 2017).

Selain itu, pada 2018 Qatar menjanjikan akan melakukan investasi senilai 15 Miliar USD di Turki untuk membantu Turki mengatasi penurunan nilai mata uang Lira terhadap Dollar Amerika yang sempat turun ke titik terendah dalam sejarah

akibat sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat kepada Turki, dimana investasi tersebut diumumkan setelah pertemuan antara Recep Tayyip Erdogan dengan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Ankara, Turki (Adiyudha, 2018).

Kemudian, pada 3 September 2018, Qatar memutuskan untuk memperluas investasinya di Jerman padahal sebelumnya Qatar telah menanamkan investasi senilai 20 Miliar USD di Jerman. Alasan Qatar memperluas investasinya di Jerman karena Qatar melihat bahwa Jerman merupakan pemain penting dalam perekonomian dunia dan Qatar optimis dengan kondisi pasar Jerman yang besar. Alasan lain yaitu Qatar ingin memperluas investasinya di berbagai sektor di Jerman, dan alasan yang utama yaitu Qatar ingin membuktikan bahwa Qatar mampu berdiri walaupun diisolasi oleh sejumlah Negara Teluk (Tempo.co, 3 Alasan Qatar Pilih Investasi ke Jerman , 2018).

Pada awal tahun 2019, Qatar kembali mengumumkan akan melakukan investasi di Amerika Serikat dimana Qatar berencana akan meningkatkan investasi di Amerika Serikat hingga 45 Miliar USD dari capaian saat ini senilai 30 Miliar USD yang direncanakan akan tercapai dalam dua tahun kedepan. Tujuan dari investasi ini yaitu untuk menyeimbangkan portofolio Qatar yang saat ini investasinya sebagian besar masih terkonsentrasi di Eropa, dan Qatar Investment Authority telah mengamati sejumlah sektor-sektor seperti real estate, teknologi, atau emiten potensial dari bursa efek Amerika (Aninda, 2019).

Pada Januari 2018, pemerintah Qatar menyetujui undang-undang yang mengizinkan investor asing memiliki saham 100% dari sebelumnya yang hanya boleh memiliki 49% dari total saham (Jurnas.com, 2018). Namun, draft Undang-undang ini masih harus melalui pengesahan dari Majelis Syura, Undang-undang ini nantinya akan menggantikan Undang-undang nomor 13 tahun 2000 tentang investasi asing di Qatar (Assegaf, Qatar akan izinkan seratus persen investasi asing, 2018).

Undang-undang ini bertujuan untuk menaikkan pajak pendapatan perusahaan, melindungi investor dalam dan luar Negeri, dan juga meningkatkan status Qatar di berbagai macam indikator ekonomi global, dimana Undang-undang tersebut memperbolehkan investor asing untuk berinvestasi di perbankan dan perusahaan

asuransi namun tidak dapat membeli perusahaan-perusahaan dagang dan property (Assegaf, Qatar akan izinkan seratus persen investasi asing, 2018).

Tetapi, Qatar memperbolehkan investor asing untuk menyewa lahan untuk perusahaan mereka dan dapat mengimpor apapun untuk keperluan operasi perluasan investasi mereka di Qatar, Qatar juga membebaskan para investor asing dari bea masuk mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek. Syekh Ahmad bin Jasin bin Muhammad ats Tsani selaku Menteri Perekonomian dan Perdagangan Qatar mengatakan bahwa Undang-undang baru tersebut akan memajukan perekonomian Qatar dan menambah kepercayaan investor asing terhadap Qatar, serta 100% investasi asing itu akan berlaku di semua sektor ekonomi (Assegaf, Qatar akan izinkan seratus persen investasi asing, 2018).

#### **b) Memproduksi Komoditas Impor**

Selama ini Qatar selalu mengimpor bahan makanannya dari Arab Saudi dan Negara-negara Teluk, dimana hampir 80% sumber bahan makanan Qatar berasal dari impor tersebut. Sejak dijatuhkannya sanksi ekonomi oleh Arab Saudi, Qatar sempat mengalami kebingungan untuk memenuhi kebutuhannya yang bergantung dari Arab Saudi dan Negara-negara Teluk.

Namun, Qatar tidak ingin memenuhi tuntutan Arab Saudi yang berarti Qatar harus mengilangkan ketergantungannya terhadap Arab Saudi. Akhirnya Qatar merestrukturisasi ekonomi nasional salah satunya dengan memproduksi sendiri komoditas yang selama ini diimpor dari Arab Saudi, salah satunya adalah produk susu dan olahan berbahan dasar susu. Sebelum Qatar mendapatkan sanksi ekonomi, Qatar selalu mengimpor susu dari Arab Saudi dan tidak memiliki peternakan sapi untuk memproduksi susu sendiri (Knell, 2018).

Satu bulan setelah pemberian sanksi ekonomi oleh Arab Saudi, Qatar mendatangkan sapi-sapi dari Amerika Serikat dengan pesawat Qatar Airways. Qatar berusaha untuk memproduksi sendiri komoditas yang dislama ini diimpor, contohnya adalah susu dan produk olahan berbahan dasar susu dengan mengembangkan peternakan sapi. Hingga saat ini Qatar memiliki kurang lebih 10.000 ekor sapi di peternakan Baladna yang terletak jauh di pedalaman gurun Qatar. Peternakan ini dilengkapi dengan peralatan-peralatan canggih dari Korea

Selatan yang akan menunjang produksi susu untuk memenuhi kebutuhan susu di Qatar (Knell, 2018).

Ekonomi Qatar yang ditunjang dari hasil produksi LNG dan investasi ini menjadikan Qatar sebagai salah satu Negara dengan perekonomian yang kuat di dunia dan nomor satu di kawasan Teluk melebihi Arab Saudi, berbalik 180 derajat dari kondisi Qatar yang dulu merupakan Negara yang miskin. Banyaknya investasi yang dijalankan Qatar membuat Qatar untuk tidak terlalu bergantung kepada hasil produksi minyak bumi maupun gas alam, disisi lain Arab Saudi masih belum bisa untuk melepaskan ketergantungannya dari hasil produksi minyak bumi dan belum bisa menyaingi investasi Qatar.

Qatar melakukan restrukturisasi terhadap perekonomiannya dengan menjalankan diversifikasi ekonomi untuk menambah pemasukan Negara karena Qatar sadar bahwa sumber daya minyak dan gas alam mereka dapat habis dan tidak akan bertahan selamanya, sehingga Qatar harus mulai menyiapkan sumber pendapatan dari sektor lain dengan menyalurkan pemasukan dari sektor minyak dan gas ke sektor-sektor lain seperti investasi. Qatar juga berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang selama ini diimpor dari Arab Saudi dengan memproduksi sendiri komoditas impor salah satunya yaitu produk susu dan olahan berbahan dasar susu.

Karena perekonomiannya yang kuat dan melebihi Arab Saudi, Qatar menganggap bahwa Qatar juga memiliki posisi kekuatan yang setara bahkan melampaui Arab Saudi untuk menancapkan dominasinya di kawasan Teluk dan melepaskan diri dari Arab Saudi yang selama ini selalu mendominasi dan mencoba untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan Qatar.

Arab Saudi memberikan sanksi ekonomi dengan harapan Qatar akan mengalah dan memenuhi tuntutan dari Arab Saudi karena Qatar tidak mampu bertahan menghadapi sanksi ekonomi yang diberikan Arab Saudi. Namun, ternyata harapan Arab Saudi tidak menjadi kenyataan karena Qatar menolak untuk memenuhi tuntutan dari Arab Saudi karena Qatar merupakan Negara yang kuat dan dapat berdiri dengan mandiri walaupun mendapatkan sanksi ekonomi dari Arab Saudi.

Dengan kekuatan ekonominya yang berasal dari sektor migas dan non migas, Qatar tidak takut untuk menolak memenuhi tuntutan yang diberikan oleh Arab Saudi dimana Qatar beranggapan bahwa Arab Saudi tidak ingin Qatar untuk membuat kebijakannya sendiri, tetapi harus mengikuti kebijakan yang diinginkan oleh Arab Saudi dan Qatar tidak akan melakukan

hal itu karena Qatar merupakan Negara yang berdaulat, sehingga Qatar dapat membuat kebijakannya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun (Trofimov, 2018).

Dengan melihat reaksi-reaksi Qatar setelah mendapatkan sanksi ekonomi dari Arab Saudi, maka dapat dikatakan bahwa sanksi ekonomi yang diberikan oleh Arab Saudi tidak efektif. Dalam *On the Effect of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of Rhodesia*, Johan Galtung menganalisa bahwa untuk mengukur keberhasilan sanksi, mampu dilihat dari reaksi-reaksi yang dilakukan Negara *target* untuk menanggulangi kerugian yang didapatkan. Reaksi-reaksi tersebut dapat sebagai berikut (1) *target* berusaha untuk melatih diri untuk beradaptasi dengan keadaan, (2) merestrukturisasi ekonomi nasional, seperti memproduksi sendiri komoditas impor, (3) menjalin hubungan dengan pihak ketiga (Galtung, 1967, pp. 387-388).

Maka sanksi ekonomi Arab Saudi terhadap Qatar dapat dikatakan tidak efektif, karena salah satu indikator suksesnya sanksi menurut Galtung yaitu reaksi Negara *target* dalam mengatasi sanksi, jika Negara *target* tidak dapat memberikan reaksi tersebut maka sanksi ekonomi dianggap berhasil. Salah satunya adalah restrukturisasi ekonomi nasional, dimana Qatar mampu merestrukturisasi ekonomi nasionalnya dengan program diversifikasi ekonomi dan juga memproduksi sendiri komoditas impor sehingga walaupun mendapatkan sanksi ekonomi dari Arab Saudi Qatar masih mampu bertahan dari sanksi ekonomi Arab Saudi. Maka dapat dikatakan untuk saat ini sanksi ekonomi Arab Saudi terhadap Qatar tidak efektif.

Dengan Qatar mampu memberikan reaksi-reaksi tersebut, maka efektivitas sanksi menurut Carter juga tidak terpenuhi karena menurut Carter suatu sanksi dianggap efektif apabila tujuan dari Negara *sender* memberikan sanksi ekonomi kepada Negara *target* tercapai seperti Negara *target* harus membuat kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan *sender*, sehingga efektivitas sanksi ekonomi menurut Carter tidak terpenuhi. Maka sanksi ekonomi Arab Saudi terhadap Qatar tidak efektif.

## **KESIMPULAN**

Konflik antara Arab Saudi dengan Qatar sebenarnya telah terjadi sejak beberapa dekade lalu, namun hubungan Arab Saudi dengan Qatar mengalami pasang surut sejak konflik pertama. Arab Saudi dan Qatar memiliki hubungan yang baik pada masa Khalifa bin Hamad Al Thani masih menjabat sebagai emir Qatar dan karena adanya kesamaan bahasa, agama,

budaya, serta kerajaan Arab Saudi dan kerajaan Qatar sama-sama menganut wahabi walaupun di Qatar tidak seketat di Arab Saudi.

Kemudian Arab Saudi dan Qatar juga sama-sama terlibat dalam pembentukan Gulf Cooperation Council pada 1981 dan Peninsula Shield Force pada 1985, pembentukan Gulf Cooperation Council ini didasarkan pada kekhawatiran Negara-negara Teluk terhadap ancaman Iran yaitu meluasnya pengaruh revolusi Iran dan pembentukan Peninsula Shield Force untuk menjaga keharmonisan diantara Negara-negara anggota Gulf Cooperation Council dan menjaga kedamaian di Timur Tengah.

Arab Saudi juga menjalin kerjasama export dan impor dengan Qatar. Dimana, export Arab Saudi ke Qatar senilai 1,66 Miliar USD pada 2016 dan impor sebesar 318,82 Juta USD dan export Qatar ke Arab Saudi senilai 519,26 Juta USD pada 2016 dan impor sebesar 1,38 Miliar USD menurut data COMTRADE PBB tentang perdagangan internasional.

Hubungan buruk antara Arab Saudi dengan Qatar sendiri dimulai pada 1995, dimana Khalifa bin Hamad Al Thani dikudeta oleh anaknya sendiri yaitu Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani dan sejak kudeta itu kebijakan Qatar berubah menjadi lebih independen dan tidak mengikuti keinginan Arab Saudi, hal ini lah yang menyebabkan Arab Saudi marah kepada Qatar.

Hubungan Arab Saudi dengan Qatar semakin memburuk karena Qatar menjalin hubungan dengan Iran terkait berbagi pengelolaan North Field yang merupakan ladang gas alam terbesar di dunia yang terletak di antara perbatasan Qatar dengan Iran. Arab Saudi tidak suka akan hal ini, karena Iran merupakan musuh Arab Saudi dan Arab Saudi menganggap Iran merupakan ancaman bagi stabilitas dan keamanan di Timur Tengah.

Pada 2017 merupakan puncak kemarahan Arab Saudi terhadap Qatar karena kantor berita Qatar memuat berita tentang emir Qatar yang memuji Iran dan juga Arab Saudi menuduh Qatar mendanai dan membantu terorisme di Timur Tengah. Hingga pada akhirnya Arab Saudi memutuskan hubungan dengan Qatar dan memberikan sanksi ekonomi kepada Qatar dengan menutup jalur laut, udara, darat perdagangan Qatar.

Qatar yang memiliki pendapatan yang besar bukan hanya dari gas alamnya, tetapi juga dari investasi Qatar ke Negara lain dan investasi asing yang masuk ke Qatar membuat Qatar menjadi salah satu Negara terkaya di dunia. Hal ini semakin memperburuk hubungannya dengan Arab Saudi, karena Arab Saudi juga menganggap bahwa dengan kekuatan Qatar saat

ini merupakan ancaman bagi Arab Saudi untuk mempertahankan dominasinya di Timur Tengah.

Setelah pemberian sanksi ekonomi oleh Arab Saudi terhadap Qatar, Arab Saudi memberikan 13 tuntutan yang harus dipenuhi oleh Qatar jika Qatar ingin sanksi ekonomi tersebut dicabut. Pemberian sanksi ekonomi ini sendiri bertujuan agar stabilitas Qatar akan terganggu dan Qatar akan menyerah hingga akhirnya memenuhi tuntutan Arab Saudi dan mengubah kebijakannya sesuai keinginan Arab Saudi.

Dampak dari sanksi ini, Qatar kesulitan memenuhi pasokan pangan karena 80% pasokan pangan Qatar berasal dari Negara-negara Teluk. Selain itu, warga Qatar diperintahkan untuk segera meninggalkan wilayah Arab Saudi dan tidak dapat melakukan ibadah haji karena Arab Saudi menutup sistem pendaftaran elektronik yang biasa digunakan agen-agen Qatar untuk mendaftarkan izin serta penduduk Qatar tidak dapat mendapatkan visa karena tidak adanya hubungan diplomatic antara kedua Negara.

Qatar juga terancam akan terpisah dari dataran Arab dan menjadi pulau sendiri karena Arab Saudi berencana untuk membangun kanal di perbatasan Arab Saudi dan Qatar yang akan memutus secara penuh jalur perdagangan darat Qatar.

Namun, Arab Saudi juga turut merasakan dampak dari pemberian sanksi ekonomi ini dimana pendapatan Arab Saudi berkurang karena import mereka ke Qatar terhenti. Selain itu, keinginan Arab Saudi agar Qatar memutus hubungan dengan Iran tidak terwujud, karena dengan pemberian sanksi ekonomi ini Qatar bukannya memutuskan hubungan dengan Iran tetapi malah semakin mendekatkan diri ke Iran karena Iran memberikan bantuan bahan makanan dan jalur alternatif perdagangan kepada Qatar. Selain itu, Qatar dan Iran juga terlibat kerjasama ekspansi ladang gas North Field untuk peningkatan kapasitas produksi kedua Negara.

Namun, Qatar menolak untuk memenuhi tuntutan dari Arab Saudi. Qatar memiliki ekonomi yang kuat melebihi Arab Saudi serta memiliki pengaruh di kawasan Timur Tengah, sehingga seharusnya Qatar memiliki posisi yang sejajar dengan Arab Saudi. Hal ini membuat Qatar ingin melepaskan diri dari Arab Saudi dan tidak ingin kebijakan-kebijakan Negeranya diintervensi.

Qatar menganggap tanpa Arab Saudi mereka masih mampu berdiri secara mandiri karena Qatar tidak memiliki ketergantungan apapun terhadap Arab Saudi. Komoditas yang

selama ini diimport dari Arab Saudi, saat ini diproduksi sendiri oleh Qatar contohnya adalah produk susu dan olahan berbahan dasar susu.

Selain itu Qatar juga menjalin hubungan dan mendapatkan bantuan dari Iran dan Turki. Kedua Negara tersebut bersedia memberikan bantuan bahan makanan kepada Qatar yang masih sulit untuk dipenuhi oleh Qatar, selain itu juga membuka jalur udaranya untuk alternatif jalur perdagangan dan perjalanan Qatar. Qatar juga membuka pelabuhan baru sebagai jalur perdagangan baru melalui laut.

Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan sanksi ekonomi Arab Saudi terhadap Qatar dapat dikatakan tidak efektif. Suatu sanksi ekonomi dapat dikatakan sukses dan efektif apabila memenuhi beberapa hal, seperti melihat reaksi-reaksi dari Negara *target*. Reaksi tersebut antara lain seperti merestrukturisasi ekonomi nasional, pada awalnya Qatar memiliki ketergantungan dengan Arab Saudi dibuktikan dengan mayoritas kebutuhan pangan Qatar diimpor dari Arab Saudi, namun Qatar menghapuskan ketergantungan itu dengan memproduksi sendiri komoditas yang biasa diimpor dari Arab Saudi. Qatar juga membuka pelabuhan baru untuk mempermudah pemenuhan kebutuhannya dengan impor dari Negara lain tanpa harus melalui Arab Saudi. Selain itu Qatar juga melakukan diversifikasi ekonomi dengan menyalurkan pendapatan dari sektor migas ke sektor non-migas agar Qatar tidak bergantung kepada hasil migas karena Qatar sadar bahwa sumber daya migas mereka dapat habis.

Faktor lainnya yang menyebabkan sanksi dianggap efektif yaitu reaksi lainnya yang mana Negara *target* menjalin hubungan dengan pihak ketiga. Qatar menjalin hubungan dan mendapatkan bantuan dari Iran dan Turki, Iran dan Turki juga bersedia memberikan akses jalur udara dan laut untuk Qatar, sehingga Qatar dapat membangun jalur perdagangan baru melalui kedua Negara tersebut. Tujuan Arab Saudi memberikan sanksi ekonomi kepada Qatar tidak lain agar Qatar goyah dan memenuhi tuntutan Arab Saudi serta menuruti kemauan Arab Saudi untuk mengubah kebijakannya agar sesuai dengan keinginan Arab Saudi. Namun, Qatar tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan dan mengubah kebijakannya sesuai keinginan Arab Saudi karena Qatar menganggap mereka merupakan Negara yang memiliki posisi dan power yang sama dengan Arab Saudi dan sebagai Negara yang berdaulat, kebijakan mereka tidak dapat diintervensi oleh Negara lain.

Maka, dengan tidak terpenuhinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu sanksi dianggap efektif, sanksi ekonomi yang diberikan Arab Saudi kepada Qatar dinilai tidak efektif

karena tidak ada satupun faktor-faktor tersebut yang tercapai dari pemberian sanksi ekonomi ini.